

**SKRIPSI**

**ANALISIS TERHADAP PASAL 1460-1462 KUH PERDATA TENTANG  
PERALIHAN RISIKO DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM**



**OLEH:**

**PAIROS**  
**10722000360**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2011**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Analisis Terhadap Pasal 1460-1462 KUH Perdata Tentang Peralihan Risiko dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam. Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimana peralihan risiko dalam jual beli menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata? Analisis terhadap pasal 1460-1462 KUH Perdata tentang peralihan risiko dalam jual beli menurut Hukum Islam?

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peralihan risiko dalam jual beli menurut pasal 1460-1462 KUH Perdata dan untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang peralihan risiko dalam jual beli yang tercantum dalam pasal 1460-1462 KUH Perdata.

Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian kepustakaan atau *Library Research*, dengan menggunakan Sumber Data: Bahan Hukum Primer, dalam kajian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Fikh Sunnah* karangan sayyid sabiq, untuk Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti hasil karya dari kalangan hukum dan relevansinya dengan pembahasan yang diteliti dan Bahan Hukum Tersier, yakni yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum Primer dan Sekunder.

Risiko merupakan kewajiban untuk menanggung kerugian yang timbul dari suatu peristiwa di luar kesalahan para pihak yang membuat perikatan (penjual dan pembeli). Pengaturan mengenai peralihan risiko dalam jual beli dijelaskan di beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1460 KUH Perdata mengatur tentang risiko atas barang tertentu yaitu risiko berpindah kepada pembeli sejak adanya kata sepakat, walaupun penyerahan barang belum dilakukan. Pasal 1461 KUH Perdata mengatur tentang risiko atas barang yang dijual menurut timbangan, bilangan dan ukuran, yang mana risiko sudah berpindah kepada pembeli sejak barang tersebut ditimbang, dihitung maupun diukur. Sedang untuk barang yang dijual menurut tumpukan dalam Pasal 1462 KUH Perdata dijelaskan bahwa sejak semula risikonya sudah dibebankan kepada pembeli.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan risiko dalam jual beli yang terdapat dalam Pasal 1460-1462 KUH Perdata terasa tidak adil karena dalam pasal-pasal tersebut risiko dibebankan kepada pembeli yang belum menjadi pemilik barang, sedangkan menurut hukum perdata hak milik baru berpindah kepada pembeli setelah dilakukan *levering* atau penyerahan barang. Jadi selama belum di-*lever*, risiko masih harus ditanggung oleh penjual yang masih merupakan pemiliknya sampai barang diserahkan kepada pembeli. Dalam Islam, penerimaan barang termasuk dalam syarat sahnya akad, oleh karena itu penanggungan risiko masih harus ditanggung oleh penjual sampai pembeli menerimanya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Peneltian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II : KONSEP UMUM JUAL BELI .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Jual Beli .....	15
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
C. Hukum Jual Beli .....	20
D. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	20
E. Bentuk –Bentuk Jual Beli.....	25
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG KUH PERDATA DAN           RISIKO .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum KUH Perdata.....	31
1. Pengertian KUH Perdata .....	31
2. Sejarah KUH Perdata .....	32
3. Bentuk dan Isi KUH Perdata .....	34

B. Jual Beli dalam KUH Perdata.....	36
1. Pengertian Jual Beli dalam KUH Perdata .....	36
2. Asas-asas Perjanjian Jual Beli dalam KUH Perdata.....	37
C. Risiko.....	40
1. Pengertian Risiko .....	40
2. Bentuk Risiko.....	41
 <b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP PASAL 1460-1462 KUH PERDATA TENTANG PERALIHAN RISIKO DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM .....</b>	 44
A. Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata .....	45
B. Analisis Terhadap Pasal 1460-1462 KUH Perdata tentang Peralihan Risiko dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	49
 <b>BAB V : PENUTUP .....</b>	 58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individual-sosial, jasmani-rohani, *duniawi-ukhrawi*. Muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesenambungan. Islam memberikan pedoman atau aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai kebutuhan hidup tidak mungkin dapat memproduksi semua benda yang diinginkannya sendiri, tetapi dia harus bekerjasama dengan orang lain. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai aktifitas, misalnya perdagangan atau jual beli.

Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Qs. Al-

Baqarah: 275).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), h. 36.

Jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari baik oleh setiap individu dengan tujuan pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari yang paling sederhana, hingga setiap badan usaha yang mempergunakan jual beli sebagai sarana untuk menguasai dunia.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu” (QS.An-nisa’:29).<sup>2</sup>

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku suka sama suka. Dalam proses jual beli, sudah selayaknya jika barang yang diperjualbelikan dapat diterima oleh pembeli dengan baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu bila terdapat kekurangan atau cacat pada suatu barang yang akan dibeli.

Islam melarang praktek jual beli dengan penggunaan alat ukur atau timbangan yang tidak tepat dan penjualan barang palsu atau rusak. Tetapi terkadang terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, baik pada saat terjadi akad

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit., h. 65

maupun sesudahnya. Untuk setiap kelalaian ada risiko yang harus dijamin oleh pihak yang lalai.<sup>3</sup>

Risiko merupakan suatu konsepsi dengan berbagai makna tergantung bagaimana konteks disiplin ilmu yang menggunakannya. Bagi orang awam, risiko berarti menghadapi kesulitan atau bahaya, yang mungkin menimbulkan musibah, cedera atau hal-hal semacam itu yang sifatnya akan merugikan. Orang matematika melihat risiko sebagai tingkat penyebaran nilai dalam suatu distribusi di sekitar nilai rata-ratanya.<sup>4</sup>

Menurut kamus ekonomi, risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis.<sup>5</sup> Sedangkan risiko menurut kamus hukum adalah kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat suatu peristiwa di luar kesalahannya, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.<sup>6</sup> Dalam ilmu ekonomi Islam, risiko atau ketidakpastian lebih dikenal sebagai *taghrir*. *Taghrir* berasal dari bahasa Arab *gharar* yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko dan ketidakpastian. Dalam fiqh muamalah, *taghrir* diartikan sebagai melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko

---

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 127.

<sup>4</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta : Bumi Akasara, 2004), h. 17.

<sup>5</sup> Sigit Winamo, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung : Pustaka Grafika, 2003), h. 378

<sup>6</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Paradya Paramita, 1973), h. 89.

sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya, atau memasuki wilayah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.<sup>7</sup>

Dalam hukum perjanjian, risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak.<sup>8</sup> Persoalan tentang risiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam ini dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*).<sup>9</sup> Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Peristiwa mana tidak diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu perikatan dibuat.<sup>10</sup>

Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu:

1. Kreditur<sup>11</sup> tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi.
2. Debitur<sup>12</sup> tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi.
3. Risiko tidak beralih kepada debitur.
4. kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik.<sup>13</sup>

---

<sup>7</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Islam, 2002), h. 162.

<sup>8</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995), h. 24.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Ummah, 1982), h. 27.

<sup>11</sup> Dinamakan kreditur karena ia berhak menuntut penyerahannya.

<sup>12</sup> Dinamakan debitur karena pihak yang wajib memenuhi tuntutan.

<sup>13</sup> Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), h. 28.



Dengan demikian maka persoalan tentang risiko itu merupakan akibat dari persoalan tentang keadaan memaksa dan tidak dapat diduga. Misalnya, barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena kapal laut yang mengangkutnya karam ditengah laut akibat badai. Yang menjadi persoalan sekarang siapakah yang akan menanggung semua kerugian tersebut?

Dalam KUH Perdata peralihan risiko dalam jual beli disebutkan dalam pasal 1460 - 1462 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1460

Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.

Pasal 1461

Jika barang-barang dijual bukan menurut tumpukan, melainkan menurut berat, jumlah, dan ukuran, maka barang-barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung, dan diukur.

Pasal 1462

Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 357.

Melalui ketiga rumusan pasal tersebut, risiko mengenai kebendaan yang dijual beralih dari penjual kepada pembeli segera setelah kebendaan yang dijual tersebut ditentukan, ditimbang, dihitung atau diukur dan ditentukan tumpukannya.

Menurut pasal 1459 KUH Perdata, hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan. Ini berarti, jika kebendaan tersebut musnah diluar kesalahan para pihak dalam perikatan, maka tidak adil jika pembeli harus menanggung akibatnya. Karena pembeli bukanlah pemiliknya sampai barang tersebut diserahkan.

Dalam bisnis Islam, terdapat etika bisnis yang harus dijalankan agar sebuah bisnis itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam sehingga tidak merugikan pihak lain. Setiap orang yang bertindak atau melakukan sesuatu harus disertai dengan tanggung jawab. Niat yang baik harus disertai dengan perbuatan yang baik pula, dengan niat baik semata tindakan yang tidak etis tidak menjadi etis. Sebagaimana pendapat Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Muhammad bahwa niat baik tidak menjadikan yang haram menjadi bisa diterima.

Dalam islam ada hak istimewa dalam jual beli yaitu hak yang diberikan islam kepada pihak-pihak yang melakukan jual-beli dalam mewujudkan persyaratan suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan, hak tersebut dinamakan *Khiyar*.

*Khiyar* (الخيار) ialah hak pihak-pihak yang melakukan transaksi jual-beli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Hak *khiyar* ini ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang

melakukan jual beli.<sup>15</sup> Diadakan *Khiyar* oleh *syara'* agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi tipu-menipu.<sup>16</sup> *Khiyar* itu ada tiga bentuk:

1. *Khiyar majlis*. Hak pilih untuk melanjutkan transaksi yang telah dilakukan antara meneruskannya atau membatalkannya selama masih berada dalam majlis atau tempat melakukan akad. Dasar kebolehan *muttafaq* alaih adalah hadits Nabi dari Ibnu Umar dalam riwayat yang *muttafaq* 'alaih sabda Nabi:

إِذَا بَاعَ الرَّكُؤَانِ مَنِ الْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: Bila telah berlangsung jual-beli di antara dua orang, maka masing-masing punya hak *khiyar* selama keduanya belum berpisah.

2. *Khiyar Syarat*; yaitu *khiyar* yang disepakati dan ditetapkan waktu melangsungkan transaksi yang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan bersama. Kebolehan *khiyar syarat* ini berdasarkan hadits Nabi dari 'Amru bin Syu'eb menurut lima perawi hadits selain Ibnu Majah:

عَلَيْهِ : اِعْ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا كَو

صَفَقَةِ خِيَارٍ

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 213, cet.2.

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 286

Artinya: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. bersabda: “Si penjual dan si pembeli mempunyai hak Khiyar selama keduanya belum berpisah kecuali dalam akad khiyar”.

3. *Khiyar ‘aib* yaitu hak *khiyar* yang diberikan kepada kedua pihak waktu menemukan barang atau uang yang diterimanya cacat yang cacat tersebut telah ada sebelum akad. Dasarnya adalah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, al-Thabrani, al-Darquthniy dan al-Hakim:

المسلم لا يحل لمسلم باع من خيه بيعا فيه عيب

إلا بينه

Artinya: Orang muslim itu adalah saudara orang muslim. Oleh karena itu tidak boleh seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya, yang padanya ada cacat kecuali dia menjelaskan cacat tersebut.<sup>17</sup>

Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, pembeli tidak menanggung melainkan sesudah menerimanya. Dan menurut Imam Malik, jual beli dengan keharusan bagi penjual untuk melengkapi, baik timbangan, takaran maupun bilangan maka tidak ada keharusan bagi pembeli untuk menanggung melainkan sesudah menerimanya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *loc.cit.*, h. 213.

<sup>18</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, “Analisa Fiqih para Mujtahid”, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 683.

Fuqaha yang berpendapat bahwa penerimaan termasuk dalam syarat sahnya akad atau ketetapanannya, maka tanggungan adalah dari penjual dan menurut Imam Malik, sampai pembeli menerimanya.

Dalam *fiqh sunnah* karangan Sayyid Sabiq juz 12, dijelaskan bahwa risiko atas kerusakan barang dibedakan menjadi dua yaitu kerusakan barang sebelum serah terima dan kerusakan barang sesudah serah terima.

Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan oleh penjual dan pembeli, ada beberapa kelompok berdasarkan kasusnya, yaitu:

1. Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahterimakan akibat perbuatan pembeli, maka jual beli tidak menjadi *fasakh* (batal), akad berlangsung seperti sedia kala. Dan pembeli berkewajiban membayar penuh, karena ia menjadi penyebab kerusakan.
2. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada orang lain atau membatalkan akad.
3. Jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana alam dari Allah.
4. Jika sebagian barang rusak lantaran perbuatan penjual, maka pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk yang utuh pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambilnya dengan potongan harga.

5. Adapun jika kerusakan akibat ulah barang tersebut, ia tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan; antara membatalkan akad atau mengambil sisa yang tak rusak dengan membayar kesemuanya.
6. Jika kerusakan terjadi akibat bencana alam yang membuat berkurangnya kadar barang, sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.<sup>19</sup>

Menyangkut risiko kerusakan barang yang terjadi sesudah berlangsungnya serah terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Namun apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi, penjual wajib menggantikan harga barang atau menggantinya dengan yang serupa.<sup>20</sup>

Dalam kitabnya *Al-Hisbah*, Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa dasar hukum dalam tukar menukar barang atau jual beli adalah adanya keselamatan barang dan keharusan kesamaan dzahir dengan isi. Oleh karena itu apabila setelah akad ditemui adanya suatu cacat barang, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab pihak yang menyerahkan barang cacat tersebut, yang selanjutnya menuntut adanya ganti rugi (*dhaman*) dari pihak yang menyebabkan kerugian.<sup>21</sup>

Melihat permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (terj.), (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), Jilid 12, h. 100

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 192.

## **ANALISIS TERHADAP PASAL 1460-1462 KUH PERDATA TENTANG PERALIHAN RISIKO DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM.**

### **B. Batasan Masalah**

Kajian ini hanya difokuskan pada **PASAL 1460-1462 KUH PERDATA TENTANG PERALIHAN RISIKO DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM**

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini akan menganalisa peralihan risiko dalam jual beli menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata.

Adapun permasalahan yang akan penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peralihan risiko dalam jual beli menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata?
2. Bagaimana analisis terhadap pasal 1460-1462 KUH Perdata tentang peralihan risiko dalam jual beli menurut Hukum Islam?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peralihan risiko dalam jual beli menurut Pasal 1460- 1462 KUH Perdata.

2. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang peralihan risiko dalam jual beli yang tercantum dalam Pasal 1460 - 1462 KUH Perdata.

b. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas syariah dan Ilmu Hukum dalam mencapai gelar sarjana SI dalam bidang Muamalah.
2. Berguna untuk kepentingan pribadi, agar skripsi ini berguna bagi penulis sendiri, agar bisa menambah pengetahuan penulis tentang Pasal 1460-1462 Perdata Tentang Peralihan Risiko dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam
3. Berguna bagi Universitas, dengan adanya skripsi ini di Perpustakaan Universitas agar bisa digunakan sebagai bahan bacaan bagi pengunjung.
4. Berguna bagi Mahasiswa untuk menambah pengetahuan.

**E. Metode Penelitian**

Guna mendapatkan hasil yang objektif dan maksimal maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan suatu kajian yang digolongkan kepada jenis penelitian kepustakaan atau dikenal dengan sebutan *Library Research*. Yakni suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa



buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada kaitannya dengan ruang lingkup pembahasan.

## 2. Sumber data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni meneliti bahan-bahan pustaka yang lazim dinamakan data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan “*Fikih Sunah 12*”, Bandung: Al-Ma’arif, karangan sayyid sabiq yang dialih bahasakan oleh Kamaluddin A. Marzuki.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti hasil karya dari kalangan hukum dan relevansinya dengan pembahasan yang diteliti yaitu Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya, Fiqh Muamalah, Pokok-Pokok Hukum Perdata karangan Prof. Subekti, SH, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, karangan Drs. C.S.T. Kansil, SH dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan seterusnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan tipe penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni peran aktif menulis untuk menganalisa Pasal 1460-1462 KUH Perdata Tentang Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam serta menelaah literatur-literatur kepustakaan lainnya yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Metode Penulisan

Setelah data-data yang berhubungan dengan penulisan dapat dikumpulkan maka penulis membahas dengan cara sebagai berikut:

##### *a. Induktif*

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

##### *b. Deskriptif Analitik*

Metode ini adalah suatu cara mengumpulkan data yang dianggap berhubungan dengan permasalahan yang diteliti kemudian dilukiskan secara sistematis.

#### 5. Metode Analisa Data

Dengan menggunakan content analisis yaitu menganalisis pendapat seseorang kemudian ditambah pendapat lain, lalu diambil kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II dalam bab ini berisi tentang Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum jual Beli, Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli dan Bentuk-Bentuk Jual Beli.

BAB III berisi tentang Gambaran Umum KUH Perdata, Jual Beli dalam KUH Perdata, dan Risiko.

BAB IV meliputi Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata dan Analisis Terhadap Pasal 1460-1462 KUH Perdata tentang Peralihan Risiko dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam.

BAB V Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI

#### A. Pengertian Jual Beli

Salah satu cara untuk memiliki suatu barang yang sah menurut syara' adalah karena *uqud* atau *aqad* yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang di peroleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Secara etimologi kata jual beli berasal dari bahasa arab, yaitu:

البيع sebagai masdar dari fiil madhi بيعا - يبيع yang berarti jual atau menjual.<sup>2</sup>

Sedangkan kata beli berasal dari bahasa arab yaitu, yang diambil dari fiil madhi

يشري - يشرى yang berarti beli atau membeli.<sup>3</sup>

Kata البيع dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata (beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan

sekaligus juga kata “beli”.<sup>4</sup> Untuk membedakan kata jual dengan membeli (

البيع ) dapat dilihat dari firman Allah:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

---

<sup>1</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1984), h. 71.

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, ( Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), h. 75.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Op.cit.*, h. 113.

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka”. (QS. At-Taubah: 111)<sup>5</sup>

Dalam ayat tersebut kata mengandung pengertian membeli. Sedangkan pengertian menjual terdapat dalam surat Yusuf ayat 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ

Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja”. (QS. Yusuf: 20)<sup>6</sup>

Adapun ayat yang menunjukkan arti jual beli adalah:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

Artinya: “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah. (QS. An-nur: 37)<sup>7</sup>

Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli.

Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian jual beli diantaranya adalah:

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah:

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.* , h. 163.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

دلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu.<sup>8</sup>

Cara tertentu yang dimaksud adalah *ijab* dan *qabul*, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.<sup>9</sup>

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, jual beli adalah:

عقد يقوم على أساس مبادلة المال بالمال ليفيد تبادل الملكيات

Artinya: Akad yang terdiri atas dasar penukaran harta dengan harta lalu terjadilah penukaran milik secara tetap.<sup>10</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, yang dinamakan jual beli adalah:

مبادلة مال بمال على سبيل التراضا ارض على الوجه ن فيه

Artinya: Menukar harta dengan harta, dengan jalan suka sama suka, atau menukar milik dengan memberi ganti, dengan cara yang dijanjikan padanya.<sup>11</sup>

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.

---

<sup>8</sup> M.Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 113.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 94.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, (Beirut: Dar Al-fikr, 1983), hlm. 126.

2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.<sup>12</sup>

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan jual beli. Pedoman tersebut adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw.

### **a. Al-Qur'an**

Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

Firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

(QS. Al-Baqarah: 275)<sup>13</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dibenarkan jual beli yang tidak berbentuk atau mengandung unsur-unsur riba.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

---

<sup>12</sup> Suhrahwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 129.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 36.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...” (QS. An-nisa’: 29) <sup>14</sup>

Allah telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang dibolehkan dan melarang mengambil harta orang lain tanpa izin dari mereka.

#### **b. Hadits**

Dasar hukum jual beli juga terdapat dalam beberapa hadits Nabi, antara lain:

Sabda Rasulullah:

عنہ : علیہ  
الكسب اطيب؟ قال: عما ل الرجل بيده و ل بيع  
(نر والحا كم )

Artinya: Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra, sesungguhnya Muhammad pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: ”usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)<sup>15</sup>

Sabda Rasulullah:

مين مع النبيين والصد يقين و شهداء ( رواه

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> As-Shan’ani, *Subulus Salam*, ( Beirut: Dar al-kitab al-‘arabi, 1991), h. 9.



Artinya: Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, siddiqin dan syuhada. (HR. Tirmidzi)

Pedagang yang selalu jujur, maka diberkahi usahanya di dunia dan terhormat kedudukannya di hari kemudian, yaitu bersama dengan para nabi, orang-orang yang benar (jujur) dan orang-orang yang *syahid*.

### **C. Hukum Jual Beli**

Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya para pihak dikenai hukum dalam kegiatannya.<sup>16</sup> dan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak tersebut adalah:

- a. Asal hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Jual beli yang dilakukan oleh setiap orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukumnya boleh.
- b. Wajib, umpamanya hakim menjual harta orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya, atau seorang wali yang menjual harta anak yatim karena keadaan yang memaksa (darurat).
- c. Sunah, apabila jual beli dilakukan kepada teman, kenalan atau sanak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang membutuhkan barang tersebut.

---

<sup>16</sup> R. Abdul Jamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), h. 15.

- d. Haram, apabila melakukan jual beli yang terlarang oleh agama, misalnya menjual *khamr*, obat terlarang, dan senjata yang bisa membahayakan ketenteraman umum.<sup>17</sup>

#### **D. Rukun dan Syarat Jual Beli.**

Suatu perbuatan dapat dikatakan sah apabila terdapat unsur- unsur yang sudah terpenuhi, begitu juga dengan jual beli. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

##### **1. Rukun jual beli**

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang diperjual belikan.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>18</sup>

Menurut madzhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul*, karena hanya kerelaan antara kedua belah pihak yang menjadi rukun jual beli. Unsur kerelaan dapat ditunjukkan dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

##### **2. Syarat jual beli**

- 1. Orang yang melakukan jual beli itu harus berakal dan *mumayyiz*.

---

<sup>17</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 393.

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit*, Hal.120.

2. Akad transaksi jual beli itu harus dengan ungkapan kalimat masa lalu (sudah saya jual dan sudah saya beli).
3. Barang yang diperjualbelikan harus yang boleh dimakan atau bernilai dan dapat ditetapkan penyerahannya.
4. Penjual dan pembeli harus ada perasaan sama rela.
5. Transaksi jual beli itu harus berlaku yaitu sama-sama ada hak pemilikan dan penguasaan.<sup>19</sup>

a. Syarat orang yang berakad

1. Berakal.
2. Dengan kehendaknya.
3. Keduanya tidak *mubazir* (boros).
4. *Baligh*.<sup>20</sup>
5. Beragama Islam.<sup>21</sup>

b. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

1. Orang yang mengucapkannya telah akil *baligh* dan berakal.
2. *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
3. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis.<sup>22</sup>
4. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain.

---

<sup>19</sup> As-Shan'ani, *Op.Cit.*, h. 9.

<sup>20</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 343.

<sup>21</sup> Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu lebih jelasnya lihat: Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75.

<sup>22</sup> Suhrahwardi K.Lubis, *Op. Cit*, h. 120.

5. Tidak berwaktu.<sup>23</sup> Sebab jual-beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tdk sah.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

Benda yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat sebagai berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, dan barangnya ada di tangan (dikuasai).<sup>24</sup>

1. Bersih barangnya

ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah termasuk benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Menurut Sayyid Sabiq, barang yang mengandung najis, arak dan bangkai boleh diperjualbelikan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan.<sup>25</sup> Misalnya kotoran atau tinja dan sampah dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman.

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Bangkai, *khamr* dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut dalam pandangan Islam tidak bermanfaat bagi manusia.

---

<sup>23</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 105.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 52.

<sup>25</sup> *Ibid.*

3. Milik orang yang melakukan akad atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, misalnya memperjualbelikan ikan di laut.

4. Mampu menyerahkan

Jual beli barang-barang yang dalam keadaan digadaikan atau sudah diwakafkan tidak sah, karena penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pembeli.

5. Mengetahui

Penjual dan pembeli mengetahui bentuk, zat, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya, sehingga antar keduanya tidak saling mengecoh.

6. Barang yang diakadkan ada di tangan.

Menjual barang sebelum ada di tangan, tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu rusak pada waktu masih di tangan penjual, sehingga jual beli tersebut menjadi *gharar*.

#### d. Syarat nilai tukar (Harga Barang)

Nilai tukar barang pada masa sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar tersebut terdapat dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Syarat harga barang adalah sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

2. Dapat diserahkan pada waktu transaksi, walaupun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Jika barang tersebut dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas.
3. Apabila jual beli dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan *khamar*. Karena kedua benda itu dalam pandangan syara' tidak mempunyai nilai.<sup>26</sup>

Disamping syarat yang terkait dengan rukun jual beli, ada juga syarat yang berkaitan dengan sahnya jual beli, yaitu:

1. Jual beli itu terhindar dari cacat. Misalnya barang yang diperjual belikan tidak jelas jenis, kualitas maupun kuantitasnya dan jual beli yang mengandung unsur paksaan dan penipuan.
2. Jika barang yang diperjualbelikan itu benda yang bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-suratnya diselesaikan.<sup>27</sup>

#### **E. Bentuk-bentuk Jual Beli.**

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli, maka jual beli ada 3 macam, yaitu;

---

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 125.

<sup>27</sup> *Ibid.*

1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan jual beli benda yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Yaitu jual beli pesanan (*salam*).
3. Jual beli benda yang tidak ada. Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak misalnya jual beli bawang merah atau putih atau wortel yang masih berada di dalam tanah.<sup>28</sup>

Ditinjau dari segi sah atau tidaknya, para ulama' membagi jual beli menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Jual Beli *Shahih*

Jual beli dikatakan *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, barang itu miliknya sendiri dan tidak terikat *khiyar* lagi.<sup>29</sup> Namun jual beli yang *shahih* dapat juga dilarang dalam syariat apabila:

- a. Menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain.
- b. Menyempitkan gerakan pasar.
- c. Merusak ketenteraman umum.<sup>30</sup>

2. Jual beli yang *Batil*

Jual beli menjadi tidak sah atau batal apabila salah satu atau seluruh rukun tidak dapat dipenuhi atau jual beli tersebut dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan

---

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 76.

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 128.

<sup>30</sup> Gemala Dewi, *Op. Ci.*, h. 105.

syarat. Umpamanya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang yang dijual dilarang *syara'*.

Bentuk jual beli yang *batil* antara lain:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada (بيع) Misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang masih berada di dalam perut ibunya.<sup>31</sup>
- b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan. Umpamanya menjual barang yang hilang.
- c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan. Unsur tipuan dalam jual beli bisa terjadi pada kuantitas, kualitas dan harga barang yang diperjualbelikan. Unsur tipuan pada kuantitas barang terjadi ketika penjual mengurangi takaran atau timbangan atas barang yang dijualnya. Secara kualitas unsur tipuan terjadi manakala penjual menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan. Begitupun dengan harga, penjual menaikkan harga barang yang tidak diketahui pembeli melebihi harga pasar.<sup>32</sup>
- d. Jual beli benda najis

Semua benda yang termasuk najis dan tidak bernilai menurut syariat tidak boleh diperjualbelikan. Seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.

---

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gayamedia Pratama, 2000), h. 122.

<sup>32</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania, 2004), h. 133.



e. Jual beli *al- 'urbun*

Yaitu menjual suatu barang dengan lebih dulu membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda yang dibeli diterima). Dengan ketentuan jika jual beli jadi dilaksanakan, maka uang panjar dihitung sebagai harga. Tetapi jika pembeli mengundurkan diri maka uang panjar itu menjadi milik penjual.

Jual beli *al- 'urbun* dilarang dalam Islam sebagaimana sabda Rasulullah:

نهى رسول الله عليه وسلم عن بيع العربون

Artinya: “Rasulullah melarang jual beli ‘urbun”. (HR. Ahmad, An-Nasai, Malik dan Abu Daud).

Dalam jual beli ini juga terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dan berbahaya, serta masuk kategori memakan harta orang lain tanpa pengganti.

f. Memperjualbelikan hak bersama umat manusia (kepemilikan kolektif)

Misalnya memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut. Sabda Rasulullah:

الناس شتركاء والكلاء

Artinya: “Manusia berserikat dalam tiga hal yaitu air, rumput dan api”.

(HR.Abu Daud dan Ahmad Ibn Hambal).

Menurut jumhur ulama air sumur pribadi boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu merupakan milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 133.

### 3. Jual beli yang *fasid*

Ulama madzhab Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batal. Apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli itu batal. Sedang *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada suatu perbuatan. Akad yang *fasid* tidak membawa akibat apapun bagi kedua belah pihak yang berakad.

Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal. Misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*.

Yang termasuk jual beli *fasid* adalah:

#### a. Jual beli *majhul*

Yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui atau ketidakjelasannya bersifat menyeluruh. Tetapi jika ketidak jelasannya itu sedikit, jual belinya sah. Karena tidak akan membawa perselisihan. Tolak ukur untuk unsur *majhul* itu diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan pembeli.

Umpamanya seorang pembeli ingin membeli baju dan ia meminta kepada penjual diambulkan tiga potong, dengan syarat mana yang disukainya. Sejak semula barang yang dipilih belum jelas mana yang akan dibeli, karena yang dibeli hanya satu baju dari tiga contoh yang diminta.

#### b. Jual beli yang dikaitkan dengan syarat.

Misalnya ucapan penjual kepada pembeli: “saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji.”

Menurut jumhur ulama, jual beli ini batal, tetapi *fasid* menurut ulama Hanafi. Jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi, yaitu apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.<sup>34</sup>

- c. Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

Jumhur ulama membolehkan jual beli yang dilakukan oleh orang buta apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar* kemampuan meraba atau mengindera.

- e. Barter barang dengan barang yang diharamkan

Misalnya babi ditukar dengan beras, *khamar* ditukar dengan pakaian.

- f. Jual beli *al-ajal*

Yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh kemudian dibeli kembali dengan tunai.

Misalnya seorang menjual barangnya dengan harga 150.000, dengan pembayarannya ditunda selama satu bulan. Setelah barang diserahkan, pemilik pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah misalnya 120.000, sehingga pembeli pertama berhutang 30.000. jual beli ini termasuk jual beli *fasid* karena mengarah kepada riba.

- g. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan *khamar*.

---

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 126.

Jika telah terjadi akad, maka akadnya batal, karena tujuan akad adalah untuk mendapatkan manfaat. Tetapi disini kedua belah pihak tidak mendapatkan manfaat, justru mengakibatkan terjadinya hal yang dilarang oleh *syara'*.<sup>35</sup>

h. Menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan

Misalnya jika pembeli membeli dengan kontan harganya 750.000, tetapi jika berhutang harganya menjadi 800.000. Menurut ulama madzhab Syafi'i dan Hambali, jual beli bersyarat tersebut adalah batal, tetapi madzhab Maliki menyatakan sah apabila pembeli diberi hak *khiyar* (pilihan).<sup>36</sup>

i. Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya.

Seperti menjual tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup dan menjual sepatu cuma sebelah.

j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen Menurut madzhab Hanafi, jika buah-buahan sudah berada dipohonnya tetapi belum layak dipanen, maka apabila pembeli diisyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah.

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 77.

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 137.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM KUH PERDATA DAN RISIKO**

### **A. Gambaran Umum KUH Perdata**

#### **1. Pengertian KUH Perdata**

KUH Perdata adalah suatu terjemahan dari BW (*Burgerlijk Wetboek*), yaitu sebuah kitab undang-undang yang berasal dari zaman pemerintahan Hindia Belanda dahulu. KUH Perdata atau BW sering juga disebut sebagai hukum perdata barat yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara perseorangan yang satu dengan yang lainnya dalam menyelenggarakan kepentingannya.<sup>1</sup> Hukum perdata kadang disebut juga sebagai hukum sipil atau hukum privat.<sup>2</sup>

Obyek hukum perdata dalam bidang hukum harta kekayaan dapat berupa barang atau hak. Sedang subyek hukum perdata dapat berupa:

- a. Manusia tunggal.
- b. Badan hukum, misalnya perhimpunan dan yayasan.

Kesimpulannya, KUH Perdata adalah kitab undang-undang hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subyek hukum yaitu manusia ataupun badan hukum dalam menyelenggarakan kepentingannya.

---

<sup>1</sup> HAM Effendi, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Semarang: Duta Grafika, 1994), h. 57.

<sup>2</sup> *Ibid.*

## 2. Sejarah KUH Perdata

Sejarah terbentuknya KUH Perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah terbentuknya KUH Perdata atau BW di Belanda dan *code civil* Perancis. Hal ini dikarenakan Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dalam waktu yang lama, dan Belanda juga pernah diduduki oleh Perancis, sehingga terpengaruh oleh *code civil* Perancis.

Sebelum terjadinya revolusi, terdapat pemisahan hukum Perancis yaitu antara *pays de droit ecrit* (daerah hukum tertulis) dan *paya de droit coutumier* (daerah hukum kebiasaan).<sup>3</sup> Untuk hukum tertulis berlaku di Perancis Selatan, sedangkan hukum kebiasaan Perancis kuno atau hukum tidak tertulis berlaku di Perancis Utara.<sup>4</sup> Dari kedua hukum tersebut menimbulkan ketidaksatuan hukum, sehingga diupayakan adanya kodifikasi terhadap hukum tersebut.

Pada tahun 1793 untuk pertama kalinya diajukan suatu rancangan, tetapi karena dianggap kolot maka rancangan ini ditolak. Pada tahun 1804 terwujudlah usaha kodifikasi yang disebut dengan *code civil des prancais* yang berlaku mulai 21 Maret 1804. Karena mengalami banyak penambahan disana sini maka pada tahun 1807, *code civil des prancais* diundangkan kembali dengan sebutan *code civil napoleon*.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Paul Scholten, *MR.C. Asser Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda: Bagian Umum*, (Yogyakarta: UGM, 1992), h. 233.

<sup>4</sup> F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 21.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Setelah Perancis meninggalkan Belanda, maka diadakan perubahan-perubahan. Usaha pertama dipimpin oleh Joan Melchier Kemper, guru besar di Leiden. Pada tahun 1820 rancangan yang dikemukakan oleh Kemper ditolak oleh dewan perwakilan rakyat. Barulah pada tahun 1829 dengan pemprakarsa Nicolai, kodifikasi baru terbentuk dengan banyak dipengaruhi pemikiran Belgia dan mengesampingkan Belanda.

Bersama kitab undang-undang lain (dagang, acara perdata, acara pidana) menurut keputusan raja tertanggal 5 Juli 1830 maka *Burgerlijk Wetboek* akan diberlakukan mulai 1 Februari 1831.<sup>6</sup> Tetapi pada tahun 1830-1839 terjadi pemberontakan dan akibatnya Belanda pisah dengan Belgia. Kodifikasi yang sudah terbentuk, ditinjau dan diubah sesuai dengan keadaan Belanda. Maka dengan keputusan raja tertanggal 10 april 1838, kodifikasi hukum perdata Belanda dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838 dan mempunyai kekuatan mengikat.<sup>7</sup>

Di negara kita yang statusnya masih dijajah Belanda, *Burgerlijk Wetboek* diumumkan berlakunya dengan publikasi tanggal 30 April 1847. Pada awalnya hanya berlaku bagi golongan penduduk Eropa, kemudian sejak dasa warsa kedua abad kedua puluh kitab undang-undang itu dinyatakan berlaku juga bagi beberapa

---

<sup>6</sup> Paul scholten, *Op. Cit.*, h. 242.

<sup>7</sup> F.X. Suhardana, *Op. Cit.*, h. 23.

golongan. Tetapi kitab undang- undang itu tidak berlaku bagi golongan yang tetap tunduk pada hukum adat.<sup>8</sup>

Akan tetapi di zaman Hindia Belanda telah ada peraturan undang-undang Eropa yang dinyatakan berlaku untuk bangsa Indonesia asli, seperti perihal perjanjian kerja perburuhan, perihal hutang-hutang dari perjudian. Akhirnya ada pula peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara, misalnya undang-undang hak pengarang, peraturan umum tentang koperasi dan ordonansi tentang pengangkutan diudara.<sup>9</sup>

Keadaan ini tidak berubah meskipun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahkan adanya pasal II aturan peralihan memberi kesempatan untuk memperpanjang eksistensi kitab undang-undang tersebut.<sup>10</sup>

### **3. Bentuk dan Isi KUH Perdata**

Sistematika hukum perdata dibagi 2 yaitu:

- a. Sistematika menurut ilmu pengetahuan hukum yang terbagi dalam
  1. Hukum orang (*Personenrecht*)
  2. Hukum keluarga (*Familierecht*)
  3. Hukum harta kekayaan atau hukum harta benda (*Vermogenrecht*) Yang terdiri atas:

---

<sup>8</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 461.

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, ( Jakarta: PT. Intermasa, 1975), h. 11.

<sup>10</sup> Setiawan, *Op. Cit.* h. 461.



a) hukum harta kekayaan mutlak atau absolut, yang meliputi hak-hak kebendaan material dan imaterial seperti hak atas merek, hak cipta dan hak *oktroi*. Yaitu hak menemukan dibidang industri

b) Hukum harta kekayaan nisbi atau relatif, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan.<sup>11</sup> Contohnya: dari persetujuan jual-beli terdapat hak relatif, seperti: hak penjual untuk menerima pembayaran dan kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli, hak pembeli untuk menerima barang dan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada penjual<sup>12</sup>

4. Hukum waris (*Erfrecht*) adalah ketentuan hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan setelah seseorang meninggal dunia.<sup>13</sup>

b. Sistematika menurut undang-undang yang terbagi dalam:

Buku I : Perihal orang, memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan (*personen en familirecht* atau *van personen*)

Buku II : Perihal benda, memuat hukum kebendaan dan hokum warisan (*zakenrecht* atau *van zaken*)

Buku III : Perihal perikatan, memuat hukum kekayaan yang mengenai hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu (*verbintenissenrecht* atau *van verbintenissen*)

---

<sup>11</sup> Asis Safioedin, *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 92.

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 121.

<sup>13</sup> Asis Safioedin, *loc.cit.*

Buku IV : Perihal perikatan dan lewat waktu, memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum (*bewijsrecht en verjaring* atau *bewijs en verjaring*).<sup>14</sup>

## **B. Jual Beli Dalam KUH Perdata**

### **1. Pengertian Jual Beli dalam KUH Perdata**

Jual beli merupakan kata majemuk sebagai terjemahan dari istilah Belanda *koop en verkoop* yang mengandung pengertian bahwa pihak satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koopt* (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan *sale* yang berarti penjualan, sedang dalam bahasa Jerman dipakai perkataan *kauf* yang berarti pembelian.<sup>15</sup>

Perjanjian jual beli dalam pasal 1457.<sup>16</sup> Menurut Pasal 1457 KUH Perdata jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Unsur esensial perjanjian jual beli adalah adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran

---

<sup>14</sup> Masduha Abdurrahman, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Central Media, 1990), h. 37.

<sup>15</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), h. 2.

<sup>16</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

atas penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang, bukanlah perjanjian jual beli tetapi perjanjian barter atau tukar menukar.<sup>17</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yaitu penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dalam jual beli terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan.<sup>18</sup>

Pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak atas tagihan yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedang dari sisi perikatannya, jual beli melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya saja, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara timbal balik satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, maka jual beli dimasukkan dalam buku ketiga tentang perikatan.<sup>19</sup>

## **2. Asas-asas Perjanjian Jual Beli**

- a. Jual beli merupakan perjanjian timbal balik

---

<sup>17</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 225.

<sup>18</sup> Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 7.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Perjanjian timbal balik disebut juga perjanjian bilateral, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, yang mana hak dan kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Bila dalam perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut yang satu mempunyai hak, maka pihak yang lain memikul kewajiban.<sup>20</sup>

b. Jual beli merupakan perjanjian konsensual (kesepakatan)

Konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak.<sup>21</sup>

Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yaitu, jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang harga dan barang, meskipun barang itu belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa suatu kesepakatan lisan saja, yang telah tercapai antara para pihak yang membuat atau mengadakan perjanjian telah membuat perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

c. Jual beli bertujuan mengalihkan hak milik.

Hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain, karena hanya yang berhaklah yang dapat menikmati dan menguasai

---

<sup>20</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, buku I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 44.

<sup>21</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian, Op.Cit.*, h. 3.

sepenuhnya dan sebebasnya, yaitu dalam arti dapat mengalihkan, membebani atau menyewakan, memetik hasilnya, memelihara bahkan merusak. Menurut Pasal 584 KUH Perdata, hak milik atas benda dapat diperoleh melalui:

1. Pemilikan atau pengakuan.
2. Perlekatan.
3. Lampau waktu atau daluwarsa.
4. Pewarisan.
5. penyerahan (levering).<sup>22</sup>

Penyerahan merupakan cara memperoleh hak milik yang penting dan paling sering dilakukan dalam masyarakat. Hak milik atas benda dapat diperoleh melalui penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik tersebut, misalnya: jual beli, tukar menukar dan hibah.<sup>23</sup>

d. Jual beli merupakan perjanjian *obligatoir*.

*Burgerlijk Wetboek (BW)* menganut sistem bahwa perjanjian jual beli itu hanya bersifat *obligatoir* saja. Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang hanya (baru) meletakkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik. Sifat jual beli ini tampak jelas dari Pasal 1459 KUH Perdata, yang menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan (menurut

---

<sup>22</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia), h. 30.

<sup>23</sup> *Ibid.*

ketentuan-ketentuan yang bersangkutan). Hal ini berlainan dengan sistem *code civil*, yang menetapkan bahwa hak milik sudah berpindah kepada pembeli sejak dicapainya kata sepakat tentang barang dan harga.<sup>24</sup>

Dalam hukum adat, asas jual beli adalah terang dan tunai. Walaupun sudah terjadi kesepakatan diantara dua pihak, jika harga barang belum dibayar dan kebendaan belum diserahkan maka jual beli tersebut belum terjadi.<sup>25</sup> Dalam hukum adat, jual beli lebih mengutamakan asas-asas kekeluargaan.

## **C. Risiko**

### **1. Pengertian Risiko**

Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi pengertiannya secara ilmiah dari risiko sampai saat ini masih tetap beragam, antara lain;

- a. Menurut Abas Salim, risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loss*).<sup>26</sup>
- b. Sedangkan risiko yang dikemukakan oleh Herman Darmawi adalah penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1979), h. 80.

<sup>25</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Pustaka, 1992), h. 102.

<sup>26</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2005, h. 4.

<sup>27</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, ( Jakarta: Bumi Aksara), 1994, h. 7.

- c. Menurut kamus hukum, risiko adalah suatu keharusan memegang suatu kerugian karena suatu peristiwa (yang tidak terduga).<sup>28</sup>
- d. Dalam ilmu ekonomi Islam, risiko atau ketidakpastian lebih dikenal sebagai *taghrir*. *Taghrir* berasal dari bahasa Arab *gharar* yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko dan ketidakpastian. Dalam fiqh muamalah, *taghrir* diartikan sebagai melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya, atau memasuki wilayah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.<sup>29</sup>
- e. Ahli fiqh sepakat mengenai definisi *gharar*, yaitu untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada, atau sesuatu yang mungkin terwujud dan tidak mungkin terwujud.<sup>30</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko selalu berhubungan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan.

## **2. Bentuk Risiko**

Bentuk dari risiko itu dapat bermacam-macam, antara lain:

---

<sup>28</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta), 1999, h. 410.

<sup>29</sup> Adiwarman Karim, *loc.cit.*

<sup>30</sup> AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 135.

- a. Berupa kerugian atas harta milik, kekayaan atau penghasilan. Misalnya diakibatkan oleh kebakaran atau pencurian.
- b. Berupa penderitaan seseorang. Misalnya sakit atau cacat karena kecelakaan.
- c. Berupa tanggung jawab hukum. Misalnya risiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain.
- d. Berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar. Misalnya terjadinya perubahan harga dan selera konsumen.<sup>31</sup>

Menurut ulama fikih, bentuk risiko dalam jual beli diantaranya: <sup>32</sup>

1. Barang yang dijual itu bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang yang berada di tangan penjual, barang curian).
2. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan ke tempat pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak diantarkan atau tidak tepat waktu.
3. Barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli.
4. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.

Risiko dapat dibedakan dengan berbagai macam cara, yaitu:

- a. Menurut sifatnya risiko terbagi menjadi 5 macam antara lain:
  1. Risiko yang tidak disengaja (risiko murni) adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya risiko terjadinya kebakaran, bencana alam dan pencurian.

---

<sup>31</sup> Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), h. 2.

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003), h. 127.



2. Risiko yang disengaja (risiko spekulatif) adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan lebih kepadanya.
  3. Risiko fundamental, adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita orang banyak. Misalnya, banjir dan angin topan.
  4. Risiko khusus, adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya penyebabnya mudah diketahui. Misalnya tabrakan mobil dan pesawat jatuh.
  5. Risiko dinamis, yaitu risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi.
- b. Dapat atau tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka risiko dapat dibedakan menjadi:
1. Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungkan suatu obyek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi, dengan membayar premi asuransi, sehingga semua kerugian berpindah ke perusahaan asuransi.
  2. Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, umumnya meliputi semua jenis risiko yang disengaja.
- c. Menurut sumber atau penyebab terjadinya, risiko dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri seperti kecelakaan kerja dan kesalahan manajemen.
2. Risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti persaingan dan fluktuasi harga atau perubahan kebijakan pemerintah.<sup>33</sup>

Konsep lain yang berkaitan dengan risiko adalah *peril* dan *hazard*. *Peril* (bencana) adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau disebut juga sebagai penyebab kerugian. Misalnya; kebakaran, gempa, banjir, kecelakaan dan sebagainya. Sedangkan *hazard* (bahaya) adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril* (bencana) atau *chance of loss* (kesempatan terjadinya kerugian) dari suatu bencana tertentu.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Ferdinand Silalahi, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 7.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PASAL 1460-1462 KUH PERDATA**  
**TENTANG PERALIHAN RISIKO DALAM JUAL BELI**  
**MENURUT HUKUM ISLAM**

“Pembeli adalah raja”. Kalimat inilah yang lazim diberlakukan dalam dunia transaksi jual beli, lebih jauh lagi, membentuk pola pikir kita sehingga patut dianggap sebagai budaya transaksi, budaya yang seolah menjadikan pembeli sebagai dewa penolong. Sehingga penjual harus berlaku layaknya seorang hamba kepada rajanya, dalam memberikan layanan. Demikian karena keuntungan dalam jual-beli, dianggap sebagai akhir dalam sebuah proses yang ditopang dengan langkah awal “transaksi” tersebut.

Pada posisinya yang kontradiktif, fakta memberikan gambaran bahwa penjual pun sering berlaku arogan dengan berbagai macam ekspresi negatifnya. Memangsa harta raja dengan cara curang (mengambil keuntungan sepihak tanpa menghiraukan kerugian pihak pembeli), menjual barang tidak sesuai dengan promosi, bahkan tak jarang mereka mengurangi timbangan.

Gambaran etika dalam jual beli semakin tidak tampak, karena hanya diukur dengan keuntungan. Anggapan akan keuntungan sebagai prinsip adalah prinsip yang berlaku dalam sekulerisme ekonomi maupun liberalisme, sehingga jarang sekali menjunjung tinggi asas manfaat bersama. Keuntungan yang digambarkan oleh aliran sekuler sama sekali tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam yang menitik

beratkan pada proses jual belinya dan bukan pada keuntungannya. Menurut Islam, dengan menjaga prinsip-prinsip transaksi jual beli secara berkelanjutan, akan diikuti oleh keuntungan yang seimbang antara penjual dan pembeli.

#### **A. Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata.**

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah berkenaan dengan masalah risiko di dalam perjanjian jual beli. Di dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko).<sup>1</sup> Ajaran ini timbul apabila terjadi keadaan memaksa (*overmacht*).

Keadaan memaksa, adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur, karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Peristiwa mana tidak diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu perikatan dibuat.<sup>2</sup>

Sifat keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keadaan memaksa yang bersifat obyektif dan keadaan memaksa yang bersifat subyektif.<sup>3</sup> Keadaan memaksa yang bersifat obyektif disebut juga dengan keadaan memaksa absolut,<sup>4</sup> yaitu suatu keadaan di mana benda yang menjadi obyek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun, sehingga menyebabkan perikatan menjadi batal atau berakhir. Keadaan memaksa yang bersifat subyektif atau keadaan memaksa yang

---

<sup>1</sup> *Resicoleer* adalah suatu ajaran dimana seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada sesuatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi obyek perjanjian.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Embun, 1982), h. 27.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 183.

relatif, adalah suatu keadaan di mana perjanjian masih dapat juga dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar.<sup>5</sup> Keadaan memaksa subyektif hanya menunda berlakunya perikatan, setelah keadaan memaksa tersebut hilang, maka perikatan mulai bekerja kembali.<sup>6</sup>

Dalam jual beli, risiko pembeli untuk menanggung kebendaan yang dibeli baru lahir pada saat kebendaan tersebut telah ditentukan. Pada prakteknya, penentuan mengenai penimbangan, penghitungan, pengukuran dan penumpukan tidaklah demikian mudah dan jelas untuk menentukan peruntukan kebendaan tersebut bagi pembeli tertentu. Risiko atas barang yang menjadi obyek jual beli tidak sama, terdapat perbedaan sesuai dengan sifat dan keadaan barang tersebut.<sup>7</sup>

#### 1. Obyek Jual Beli Barang Tertentu

Risiko dalam jual beli barang tertentu telah beralih kepada pembeli sejak adanya kata sepakat. Walaupun penyerahan barang belum terjadi dan penjual tetap berhak menuntut pembayaran harga seandainya barang yang diperjualbelikan tersebut musnah. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1460 KUH Perdata, yaitu Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan,

---

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op. Cit.*, h. 151.

<sup>6</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), h. 32.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 184.

dan penjual berhak menuntut harganya.<sup>8</sup> Yang dimaksud barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh si pembeli.<sup>9</sup>

## 2. Obyek Jual Beli Barang Timbangan

Obyek jual beli yang terdiri atas barang yang dijual dengan timbangan, bilangan atau ukuran, maka risiko atas barang yang diperjualbelikan tetap berada dipihak penjual sampai barang itu ditimbang, diukur dan dihitung. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1461 KUH Perdata, yaitu: Jika barang-barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah, dan ukuran, maka barang-barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai barang-barang ditimbang, dihitung dan diukur.<sup>10</sup>

## 3. Obyek Jual Beli Barang Tumpukan

Jika barang dijual menurut tumpukan atau ongkokan, maka barang-barang tersebut menjadi risiko pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur dan dihitung. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1462 KUH Perdata, yaitu: Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.<sup>11</sup>

Melalui rumusan Pasal 1460 KUH Perdata, risiko mengenai kebendaan yang dijual baru beralih dari penjual kepada pembeli, segera setelah kebendaan yang dijual

---

<sup>8</sup> Soedharyo Soimin, *Op.cit.*, h. 357.

<sup>9</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, *Op.Cit.*, h. 25.

<sup>10</sup> Soedharyo Soimin, *Loc. Cit.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

tersebut ditentukan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1461 KUH Perdata, jika kebendaan tersebut dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, maka risiko beralih dari penjual kepada pembeli segera setelah kebendaan tersebut ditimbang, dihitung atau diukur; dan menurut ketentuan Pasal 1462 KUH Perdata, dalam hal kebendaan tersebut dijual menurut tumpukan, maka risiko beralih dari penjual kepada pembeli segera setelah tumpukan tersebut ditentukan.<sup>12</sup>

Memperhatikan ketentuan Pasal 1461 KUH Perdata, risiko jual beli atas barang-barang generik, tetap berada pada pihak penjual sampai saat barang-barang itu ditimbang, diukur atau dihitung. Dengan syarat, jika barang generik tadi dijual tidak dengan tumpukan. Apabila barangnya dijual dengan tumpukan atau onggokan, barang menjadi risiko pembeli, sekalipun belum dilakukan penimbangan, pengukuran atau perkiraan.<sup>13</sup>

Dari ketentuan ketiga pasal dalam KUH Perdata tersebut, dapat dilihat bahwa KUH Perdata memberikan rumusan yang khusus (*lex specialis*), yang agak berbeda dari ketentuan umum (*lege generali*) yang diatur dalam Pasal 1237 KUH Perdata yang berbunyi:

“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir, jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.”<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli, Op. Cit.*, h. 101.

<sup>13</sup> Ridwan Khairnady, *Op. Cit.*, h. 227.

<sup>14</sup> Soedharyo Soimin, *Op. Cit.*, h. 314

Perkataan tanggungan pada Pasal 1237 KUH Perdata itu adalah sama dengan risiko, bahwa dalam hal perjanjian untuk memberikan sesuatu kebendaan tertentu, jika barang itu sebelum diserahkan kepada pihak yang berhak menerima pada waktu perjanjian telah lahir, kemudian barang itu musnah di luar kesalahan para pihak, maka risiko musnahnya barang di tanggung oleh pihak yang akan menerimanya (kreditur).

Rumusan kalimat pertama Pasal 1237 KUH Perdata mengatur tentang risiko dalam perjanjian sepihak, di mana hanya ada satu pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi, yaitu memberikan suatu kebendaan tertentu, misalnya dalam perikatan yang lahir dari suatu hibah.<sup>15</sup>

#### **B. Analisis Terhadap Pasal 1460-1462 KUH Perdata Tentang Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam**

Sebagaimana diketahui, buku III KUH Perdata tentang Perikatan, menganut asas “kebebasan” dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat” kedua pihak. Tetapi dari peraturan ini,

---

<sup>15</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, , 1989), Cet. 2. h. 251



dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.<sup>16</sup>

Sistem yang dianut oleh Buku III itu juga lazim dinamakan system “terbuka,” yang merupakan sebaliknya dari yang dianut oleh Buku II perihal hukum perbendaan. Di situ orang tidak diperkenankan untuk membuat atau memperjanjikan hak-hak kebendaan lain, selain dari yang diatur dalam BW sendiri, di situ dianut suatu sistem “tertutup.”<sup>17</sup>

Dikatakan, bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>18</sup>

Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal Hukum Perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri

---

<sup>16</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Inter Masa, 2003), h. 127.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Riduan Syahrani, *op.cit.*, h. 212.

sesuatu soal, itu berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang. Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu, karena benar pasal-pasal dari Hukum Perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap.

Biasanya, orang yang mengadakan suatu perjanjian tidak mengatur secara terperinci semua persoalan yang bersangkutan dengan perjanjian itu. Mereka hanya menyetujui hal-hal yang pokok saja, dengan tidak memikirkan soal-soal lainnya. Kalau para pihak mengadakan perjanjian jual beli misalnya, cukuplah apabila mereka sudah setuju tentang barang dan harganya. Tentang di mana barang harus diserahkan, siapa yang harus memikul biaya pengantaran barang, tentang bagaimana kalau barang itu musnah dalam perjalanan, soal-soal itu lazimnya tidak dipikirkan dan tidak diperjanjikan.

Cukuplah mengenai soal itu para pihak tunduk saja pada hukum dan undang-undang. Biasanya juga tidak ada perselisihan mengenai soal-soal itu, tetapi bilamana timbul perselisihan, maka sebaiknya para pihak menyerahkan saja kepada hukum dan undang-undang.

Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1493 dan Pasal 1338. Dalam Pasal 1493 KUH Perdata ditegaskan bahwa kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahkan mereka

diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

Ketentuan Pasal 1493 KUH Perdata tidak berdiri sendiri melainkan didukung oleh Pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>19</sup>

Selanjutnya, sistem terbuka dari Hukum Perjanjian itu juga mengandung suatu pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dibentuk. Misalnya, Undang-undang hanya mengatur perjanjian-perjanjian jual beli dan sewa-menyewa, tetapi dalam praktek timbul suatu macam perjanjian yang dinamakan sewa beli, yang merupakan suatu campuran antara jual beli dan sewa-menyewa.

Oleh karena pihak pembeli tidak mampu membayar harga barang sekaligus, diadakanlah perjanjian di mana si pembeli diperbolehkan mencicil harga itu dalam beberapa angsuran, sedangkan hak milik (meskipun barangnya sudah dalam kekuasaan si pembeli) baru berpindah kepada si pembeli apabila angsuran yang penghabisan telah terbayar lunas. Selama harga itu belum dibayar lunas, barangnya disewa oleh pembeli. Dengan demikian terciptalah suatu perjanjian yang dinamakan sewa beli itu.

---

<sup>19</sup> Soedharyo Soimin, *op.cit.*, h. 332.

Juga dalam hal seorang yang menginap di suatu hotel, terdapat suatu perjanjian campuran yang tidak saja berupa menyewa kamar, sebab ia mendapat makan dan juga mendapat pelayanan.

Meskipun hukum perjanjian dalam KUH Perdata menganut system terbuka (asas kebebasan) namun perjanjian jual beli itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kepatutan, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Dalam perjanjian timbal balik ada beberapa pasal yang mengatur masalah risiko, di antaranya adalah Pasal 1460 (risiko dalam jual beli) dan Pasal 1545 KUH Perdata (risiko dalam tukar menukar). Keduanya mengatur masalah risiko dalam suatu perjanjian timbal balik, tetapi sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya, bahkan sangat berlawanan.

Pasal 1460 KUH perdata menyatakan bahwa:

“Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya”.

Sebaliknya Pasal 1545 KUH Perdata menentukan bahwa:

“Jika barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah diluar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar menukar”.

Menurut Pasal 1460 KUH Perdata, dalam suatu perjanjian jual beli mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, sejak saat ditutupnya perjanjian barang itu sudah menjadi tanggungan pembeli meskipun barangnya belum diserahkan dan masih berada di tangan penjual. Dengan demikian, jika barang tersebut musnah bukan karena kesalahan penjual, penjual masih tetap berhak untuk menagih harga yang belum dibayar.

Akan tetapi dalam perjanjian pertukaran barang (*ruiling*), yang juga merupakan suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik (*wederkerig*), peraturan mengenai risiko sangat berlainan dengan apa yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli.

Pasal 1460 KUH Perdata meletakkan risiko pada pembeli yang merupakan kreditur terhadap barang yang dibelinya. Sedang pasal 1545 KUH Perdata (tukar menukar) meletakkan risiko pada masing-masing pemilik barang yang dipertukarkan. Pemilik adalah debitur terhadap barang yang dipertukarkan dan musnahnya barang sebelum diserahkan membuat perjanjian batal.

Seorang pembeli yang baru menyetujui menurut Pasal 1460 KUH Perdata, ia sudah dibebani dengan risiko mengenai barang tersebut. Kalau si penjual pailit, atau dilakukan suatu penyitaan terhadap harta bendanya maka barang tersebut disita sebagai milik penjual.

Memang sudah selayaknya dan seadilnya, jika dalam suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak yang lain juga dibebaskan dari kewajibannya. Karena

seseorang hanya menyanggupi untuk memberikan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, karena ia mengharapkan akan menerima juga suatu barang atau pihak yang lain akan melakukan suatu perbuatan pula.

Selain Pasal 1460 KUH Perdata, risiko mengenai jual beli juga diatur dalam Pasal 1461 dan pasal 1462 KUH Perdata. Pasal 1461 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Jika barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah dan ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung dan diukur”.

Menurut ketentuan pasal tersebut, risiko atas barang-barang yang dijual diletakkan kepada penjual. Barang-barang yang masih harus ditimbang, dihitung atau diukur dahulu sebelum dikirim atau diserahkan kepada pembeli, bisa dianggap baru dipisahkan dari barang-barang milik penjual setelah dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran. Baru setelah dipisahkan itu merupakan barang yang disediakan untuk dikirimkan kepada pembeli atau untuk diambil oleh pembeli.

Risiko yang diletakkan pada penjual tersebut memang sudah tepat, tetapi kalau setelah dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran, risiko secara otomatis dipindahkan kepada pembeli itu merupakan suatu ketidakadilan, karena pembeli bukanlah pemilik barang.

Sedangkan untuk barang yang dijual menurut tumpukan, risikonya diatur dalam Pasal 1462 KUH Perdata, yaitu:

“Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur”.

Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan sudah dari semula disendirikan (dipisahkan) dari barang-barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli. Ketentuan tentang risiko atas barang tumpukan juga merupakan suatu ketidakadilan, karena barang tumpukan sebenarnya merupakan kumpulan dari barang-barang tertentu menurut pengertian Pasal 1460 KUH Perdata.<sup>20</sup>

Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, pembeli tidak menanggung melainkan sesudah menerimanya. Dan menurut Imam Malik, jual beli dengan keharusan bagi penjual untuk melengkapi, baik timbangan, takaran maupun bilangan maka tidak ada keharusan bagi pembeli untuk menanggung melainkan sesudah menerimanya.<sup>21</sup>

Menurut penulis, Pasal 1460-1462 KUH Perdata tidak adil karena semua risiko pada dasarnya dibebankan kepada pembeli, yang baru merupakan calon pembeli bukan pemilik barang. Menurut Pasal 1459 KUH Perdata, hak milik atas barang yang diperjualbelikan tidak berpindah kepada pembeli selama barang tersebut belum diserahkan. Jadi barang yang belum diserahkan kepada pembeli termasuk dalam jaminan penjual.

Risiko jual beli yang terdapat dalam Pasal 1460 KUH Perdata dikutip dari *code civil* Perancis, tetapi saat perpindahan hak milik menurut *code civil* berlainan

---

<sup>20</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 28.

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, "Analisa Fiqih para Mujtahid", Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 683.

dengan KUH Perdata. Menurut sistem *code civil*, dalam suatu jual beli barang tertentu, hak milik sudah berpindah pada saat ditutupnya perjanjian jual beli, sedangkan menurut sistem KUH Perdata dalam segala macam jual beli hak milik itu baru berpindah kalau barangnya sudah diserahkan (*dilever*).

Dalam sistem *code civil*, peraturan mengenai risiko sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1460 KUH Perdata dapat dipertanggungjawabkan, tetapi dalam sistem KUH Perdata peraturan tersebut menimbulkan ketidakadilan.

Fuqaha yang berpendapat bahwa penerimaan termasuk dalam syarat sahnya akad atau ketetapanannya, maka tanggungan adalah dari penjual dan menurut Imam Malik, sampai pembeli menerimanya.

Sabda Rasulullah:

انهم عن بيع مالم يقبضوا و ربح مالم يمنوا

Artinya: “Laranglah mereka (orang banyak) dari menjual sesuatu yang belum mereka terima dan dari keuntungan sesuatu yang tidak mereka tanggung”

Dalam bisnis Islam, terdapat etika bisnis yang harus dijalankan agar sebuah bisnis itu tidak bertentangan dengan syari’at Islam sehingga tidak merugikan pihak lain. Setiap orang yang bertindak atau melakukan sesuatu harus disertai dengan tanggung jawab. Niat yang baik harus disertai dengan perbuatan yang baik pula, dengan niat baik semata tindakan yang tidak etis tidak menjadi etis. Sebagaimana



pendapat Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Muhammad bahwa niat baik tidak menjadikan yang haram menjadi bisa diterima.<sup>22</sup>

Akan halnya seseorang yang membunuh orang lain karena tidak sengaja, ia tidak akan terlepas dari hukuman ganti rugi senilai seratus unta atau seribu dinar emas, maka seorang penjual yang barangnya rusak walau bukan karena kesalahannya pun tetap harus menanggungnya.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (QS. Al-Maidah:

1).<sup>23</sup>

Seperti perjanjian pada umumnya, asas dasarnya kedua belah pihak harus saling memenuhi kewajiban dan saling menerima haknya. Kewajiban utama dari penjual adalah menyerahkan barang yang dijualnya, dan kewajiban bagi pembeli adalah membayar harga barang dengan sejumlah uang.

بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya. (Q.S. al-Isra: 34).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta; YKPN, 2004), h. 45.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm.84.

<sup>24</sup> *Ibid*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peralihan risiko dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 1460-1462 KUH Perdata. Menurut Pasal 1460 KUH Perdata, risiko jual beli beralih dari penjual kepada pembeli sejak adanya kata sepakat, walaupun penyerahan barang belum terjadi. Pasal 1461 KUH Perdata menjelaskan tentang peralihan risiko terhadap barang yang dijual menurut berat, jumlah dan ukuran. Setelah barang yang diperjualbelikan ditimbang, dihitung dan diukur, maka sejak saat itu risiko beralih kepada pembeli, sedangkan untuk barang yang dijual menurut tumpukan, menurut Pasal 1462 KUH Perdata yaitu sejak semula risiko dibebankan kepada pembeli. Jual beli dalam sistem Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut asas “obligatoir” yaitu perjanjian yang hanya meletakkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik.
2. Melalui ketiga rumusan Pasal 1460-1462 KUH Perdata, risiko mengenai kebendaan yang dijual beralih dari penjual kepada pembeli segera setelah kebendaan yang dijual tersebut ditentukan, ditimbang, dihitung atau diukur dan ditentukan tumpukannya meskipun belum diadakan serah terima. Ini berarti, jika

kebendaan tersebut musnah diluar kesalahan para pihak dalam perikatan, maka tidak adil jika pembeli harus menanggung akibatnya. Karena pembeli bukanlah pemiliknya sampai barang tersebut diserahkan. Dasar hukum dalam tukar menukar barang atau jual beli adalah adanya keselamatan barang dari cacat. Oleh karena itu, apabila terdapat cacat atau kerusakan barang walaupun bukan karena kesalahan para pihak (penjual dan pembeli), seorang penjual harus tetap menanggungnya sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Menurut fuqaha, penerimaan barang termasuk dalam syarat sahnya akad, maka penjual harus menanggung keselamatan barang sampai pembeli menerimanya. Pendapat para ulama tersebut mengandung nilai tersirat (*mafhum muwafaqah*) bahwasanya nilai keadilan dalam hal risiko yang terjadi ditanggung oleh pihak yang tak mampu memenuhi akad (lalai). Hal ini, tentu saja tidak pandang bulu pelaku kelalaian tersebut, baik pedagang maupun pembeli. Risikonya tentu saja, ganti rugi dari pihak yang lalai.

## **B. Sarang-saran**

Dalam setiap transaksi jual beli, terkadang terjadi kelalaian baik dari pihak penjual ataupun pembeli. Penanggungan risiko atas kerusakan atau cacat barang harus ditentukan dulu kapan terjadinya kerusakan dan siapa yang menyebabkan kerusakan tersebut. Pada masa sekarang ini persaingan usaha semakin ketat penjual diharapkan mampu memberikan pelayanan yang sebaik mungkin untuk menarik minat pembeli,

di antaranya dengan memberikan jaminan keselamatan barang dalam bentuk garansi, hak pilih dalam bentuk *Khiyar* dan asuransi.

Seorang pembeli yang sudah mendapatkan pelayanan dengan sebaik-baiknya, harus pula sadar akan kewajibannya. Pembeli tidak boleh menuntut pelayanan di luar kemampuan pihak penjual. Adanya jaminan garansi merupakan bukti adanya itikad baik dari penjual. Pembeli diharapkan tidak menyalahgunakan itikad baik tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Masduha, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam* (Surabaya: Central Media, 1990)
- Ali, AM Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Amir, Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001)
- As-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Beirut: Dar al-kitab al-'arabi, 1991)
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-karim Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1996)
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Effendi, HAM., *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Semarang: Duta Grafika, 1994)
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Haroen, Nasrun, *Fiqh muamalah*, (Jakarta :Gaya media Pratama, 2000)
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

- Jamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Islam, 2002)
- Khairandy, Ridwan, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999)
- Kusuma, Hilman Hadi, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Pustaka Ali, 1992)
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995)
- Lubis, Suhrahwardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982)
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004)
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Muftahid wa Nihayatul Muftahid*, Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, “Analisa Fiqih para Muftahid”, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz 3*, (Beirut: Dar Al-fikr, 1983)
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Sunnah 12*, (terj.), (Bandung: Al-Ma’arif, 1988)
- Safioedin, Asis, *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek*, (Bandung: Alumni, 1982)

- Salim, Abas, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, buku I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)
- Scholten, Paul, MR.C.Asser. *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda: Bagian Umum*, (Yogyakarta: UGM, 1992)
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992)
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1979)
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1979)
- \_\_\_\_\_, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1973)
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999)
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001)
- Suhardana, F.X., *Hukum Perdata I*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1989)

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan fikhiyah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Widjaya, Gunawan dan Muljadi, Kartini, *Jual Beli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Winarno, Sigit, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Grafika, 2003)

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984)

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya agung, 1999)